



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

TAHUN 2017

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA



KATA PENGANTAR

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu instansi pemerintah yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sejak berdirinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dibidang Bina Ideologi Kebangsaan, Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Nasional yang berada diwilayahnya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu tahun 2017, yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi atau gambaran yang berharga untuk evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Akhirnya penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada anggota tim yang telah menyelesaikan penyusunan LPPD Tahun 2017 sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Tanjung Selor, 11 Januari 2018

Kepala,

Drs. BASIRAN

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691228 199101 1 001



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Dasar Hukum.....	1
1.2. Gambaran Hukum.....	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	2
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	3
D. Visi dan Misi.....	4
E. Strategi dan Arah Kebijakan	6
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN.....	10
2.1. Program dan Kegiatan	10
2.2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11
2.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran	12
2.4. Perencanaan Pembangunan	13
2.5. Sarana dan Prasarana	16
2.6. Permasalahan dan Solusi	19
BAB III TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	20
3.1. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah	20
A. Forum Koordinasi	20
B. Materi Koordinasi	20
C. Instansi Vertikal Yang Terlibat	20
D. Sumber dan Jumlah Anggaran	20
E. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan	20
F. Hasil dan Manfaat Koordinasi.....	21
G. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	21
H. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.....	22
BAB IV PENUTUP.....	23
LAMPIRAN:	
1. IKK-LPPD	
2. URUSAN KESBANGPOL	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

1. Dasar pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat.

1.2. GAMBARAN HUKUM

A. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah di bentuk melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara tergambar Struktur Organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b) Kepala Sub Bagian Umum
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3) Kepala Bidang Pembinaan Idiologi Kebangsaan
 - a) Sub. Bidang Ketahanan Idiologi Negara
 - b) Sub. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan
- 4) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
 - a) Sub. Bidang Orpol, Ormas dan Kelembagaan
 - b) Sub. Bidang Lembaga perwakilan, Parpol dan Pemilu

- 5) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
 - a) Sub. Bidang Kewaspadaan Dini
 - b) Sub. Bidang Bina Masyarakat Perbatasan, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.

Tabel 1.1
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Kalimantan Utara
(Pergub Nomor : 10 Tahun 2014)



B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2017 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak **24 (Dua puluh empat)** orang yang terdiri dari : Paska Sarjana (S2) sebanyak **2 (Dua)** orang, Sarjana (S1) sebanyak **14 (Empat belas)** orang, D.3 sebanyak **2 (Dua)** Orang dan SLTA sebanyak **6 (Enam)** orang, jumlah tersebut sangat belum mencukupi kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja yang ada.



Tabel 1.2
Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Pejabat Struktural dan Fungsional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2017

NO	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR							GOLONGAN				JUMLAH
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	ESELON	SD	SMP	SLTA	D.III	S.1	S.2	S.3	I	II	III	IV	
1	Kepala Badan	1	-	II/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	III/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
3	Kasubbag. Perenc dan Pelaporan	1	-	IV/A	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Kasubbag. Keuangan	1	-	IV/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
5	Kasubbag Umum	1	-	IV/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
6	Kabid. Idiologi Kebangsaan	1	-	III/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
7	Kasubbid. Ketahanan Idiologi Negara	-	-	IV/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kasubbid. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan	1	-	IV/A	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
9	Kabid. Poldagri	1	-	III/A	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
10	Kasubbid. Orpol, Ormas dan Kelembagaan	1	-	IV/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
11	Kasubbid. Lembaga Partai Politik dan Pemilu	1	-	IV/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
12	Kabid. Kewaspadaan Nasional	1	-	III/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
13	Kasubbid. Kewaspadaan Dini	1	-	IV/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
14	Kasubbid. Bina Masyarakat Perbatasan, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	1	-	IV/A	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
15	Pelaksana	-	11	-	-	-	4	2	5	-	-	-	6	5	-	11
		13	11	-	0	0	6	2	14	2	0	0	6	13	5	24

C. Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

Dalam upaya menciptakan ketertiban administrasi pelayanan maka telah ditetapkan Standar Operasional (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara

NO	NAMA SOP	KETERANGAN
1	Penerbitan Surat Keterangan Lapor (SKL)	Bidang Politik Dalam Negeri
2	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Bidang Politik Dalam Negeri
3	Penerbitan Rekomendasi Penelitian	Bidang Politik Dalam Negeri
4	Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Bidang Politik Dalam Negeri
5	Verifikasi Berkas Bantuan Hibah Kepada LSM/Ormas/OKP	Bidang Bina Ideologi Kebangsaan

D. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh yaitu:

**“TERWUJUDNYA KESATUAN BANGSA, KETAHANAN SOSIAL,
BUDAYA DAN POLITIK DALAM BINGKAIAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**

Penjelasan mengenai visi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. **Kesatuan Bangsa** adalah suatu keadaan di masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. **Ketahanan Sosial** adalah segala keadaan di masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi gangguan/hambatan baik dari dalam maupun luar negeri.
- c. **Budaya** adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dalam rangka melestarikan keadaan sebagai benteng dari pengaruh dari luar.
- d. **Politik** adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara.
- e. **Negara Kesatuan** adalah merupakan bentuk negara Indonesia yang masih relevan dan wajib dipertahankan.
- f. **Republik Indonesia** adalah merupakan bentuk pemerintahan negara Indonesia.

Untuk mewujudkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat yang berketahanan sosial.

Mewujudkan suatu wawasan kebangsaan didalam masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Meningkatkan toleransi antar suku, agama, ras dan golongan.

Meningkatkan toleransi antar suku, agama, ras dan golongan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Meningkatkan fasilitas pendidikan politik yang sehat dan demokratis di masyarakat

Mewujudkan pendidikan politik dimasyarakat dalam berdemokrasi dalam upaya meningkatkan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Meningkatkan kewaspadaan nasional dan hubungan antar lembaga.

Diharapkan dapat terciptanya kewaspadaan dan kerjasama antar lembaga lembaga sehingga terwujudnya rasa persaudaraan yang kokoh sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan.

5. Meningkatkan transparansi pelayanan publik urusan kesatuan bangsa dan politik.

Mewujudkan transparansi dalam pelayanan masyarakat menyangkut urusan kesatuan bangsa dan politik.

6. Meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat, kelompok profesi, LSM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memberikan motivasi kepada masyarakat dan kelompok serta organisasi dalam mendukung dan terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan terkendali.

7. Mendorong meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Mendorong serta meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan perlindungan masyarakat yang aman.

8. Mendorong tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Keputusan Gubernur dalam pelaksanaan pemerintahan.

Mendorong tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Keputusan Gubernur agar dapat dilaksanakan dengan baik.

E. Strategi dan Arah Kebijakan

1) Analisa Lingkungan Internal

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara di masa yang akan datang tidak dapat terelakan dari pengaruh faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan yang ada pada organisasi, oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperbesar peranan kekuatan dan memperkecil kelemahan mengingat begitu kompleksnya variabel yang berkaitan dengan faktor internal.

a. Kekuatan

1. Perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.
2. Sarana dan parasana pendukung kinerja organisasi cukup memadai.
3. Sumber daya aparatur memiliki kemauan untuk berkembang.

b. Kelemahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi berpolitik.
2. Isu SARA sering menjadi pemicu konflik sosial
3. Kuantitas dan kualitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang belum memadai.
4. Hubungan hirarki antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota yang kurang jelas.

2) Analisa Lingkungan Eksternal

Berbagai usaha untuk memanfaatkan faktor eksternal berupa peluang yang muncul perlu dilakukan disamping memperkecil dampak yang ditimbulkan dari ancaman, atas dasar itu, maka dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang berdampak luas terhadap pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.



a. Peluang

1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya ikut mewujudkan rasa ketenteraman dan kenyamanan di Kalimantan Utara.
2. Kemudahan memperoleh akses informasi secara dini.
3. Dukungan orpol, ormas dan kelembagaan lainnya dalam menciptakan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman di Kalimantan Utara.
4. Dukungan dari pemerintah daerah atas perumusan, perencanaan, pembinaan serta kebijakan guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur cukup memadai.

b. Tantangan

1. Disintegrasi bangsa dikarenakan sebagian besar wilayah Kalimantan Utara merupakan daerah pedalaman dan perbatasan.
2. Tuntutan kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru yang ditandai dengan iklim demokratis dan keterbukaan, belum dapat diikuti sama cepatnya dengan nilai-nilai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.
3. Adanya kecenderungan sikap tidak menghargai orang lain, menyampaikan keinginan dan harapan cenderung yang sebebaskan-bebasnya.
4. Adanya kecenderungan unjuk rasa yang disertai kekerasan, intimidasi, perebutan kekuasaan politik nasional dan daerah.
5. Adanya kecenderungan pengambilan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak responsif dan belum sepenuhnya transparan.
6. Kondisi geografi dan demografi yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata.
7. Kondisi akses jalan yang belum memadai dan biaya transportasi yang mahal.

Tabel 1.4
Analisis Strategik Dengan Faktor SWOT

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE)	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan RPJMD. Sarana dan sarana pendukung kinerja cukup memadai. Sumber daya aparatur memiliki kemauan untuk berkembang. 	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi berpolitik. Isu SARA sering menjadi pemicu konflik sosial Kuantitas dan kualitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang belum memadai. Hubungan hierarki antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota yang kurang jelas.
PELUANG (O)	S + O	O + W
<ol style="list-style-type: none"> Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya ikut mewujudkan rasa ketenteraman dan kenyamanan di Kalimantan Utara. Kemudahan memperoleh akses informasi secara dini. Dukungan orpol, ormas dan kelembagaan lainnya dalam menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman di Kalimantan Utara. Dukungan dari pemerintah daerah atas perumusan, perencanaan, pembinaan serta kebijakan guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur cukup memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan optimalisasi dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia dengan ilmu pengetahuan yang ada. Memacu peluang kerja-sama dalam segala bidang dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas . Sosialisasi dan membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). 	
ANCAMAN/HAMBATAN (T)	S + T	W + T
<ol style="list-style-type: none"> Ancaman disintegrasi bangsa karena sebagian besar wilayah provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah pedalaman dan perbatasan. Tuntutan kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru yang ditandai dengan iklim demokratis dan keterbukaan belum dapat diikuti sama cepatnya dengan nilai-nilai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Berkembangnya iklim tidak menghargai orang lain, menyampaikan keinginan dan harapan cenderung yang sebebas-bebasnya. Unjuk rasa yang disertai kekerasan, intimidasi, perebutan kekuasaan politik nasional dan daerah. Pengambilan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak responsif dan belum sepenuhnya transparan. Kondisi geografi dan demografi yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Kondisi akses jalan yang belum memadai dan biaya transportasi yang mahal. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial. Menyusun strategi kebijakan untuk memacu kegiatan dalam pelaksanaan tugas. Meningkatkan hubungan komunikasi yg efektif antara pemerintah dan masyarakat Meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menciptakan pembangunan sumberdaya manusia dengan berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> Terbentuknya keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan kewaspadaan dimasyarakat terhadap ancaman baik dari dalam atau luar. Menegakkan kepastian hukum guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dilingkungan masyarakat.. Terlaksananya penyelesaian masalah konflik secara arif & bijaksana dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ada.



3) Strategi

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan strategi yang akan dilakukan adalah peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial.

4) Kebijakan

Dalam upaya mendukung strategi tersebut, maka kebijakan yang ditempuh adalah mengadakan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan, pentingnya partisipasi dalam kehidupan berpolitik serta membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program yang dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang di rencanakan untuk Periode Tahun 2017.

2.1.1. Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

2.1.2. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja.
6. Penyediaan alat tulis kantor.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor.



9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
11. Penyediaan makanan dan minuman.
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
13. Rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke`dalam daerah.
14. Penyewaan rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas.
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
16. Pendidikan dan pelatihan formal.
17. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
18. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
19. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat.
20. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
21. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
22. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
23. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.
24. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
25. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.
26. Penyuluhan kepada masyarakat.
27. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik.
28. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2.2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun semenjak berdirinya Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 22 April 2013 dan terbentuknya perangkat daerah yang ditandai dengan pelantikan pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 22 Mei 2013 sampai saat ini, telah tercapai target kinerja pelayanan, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)	Realisasi Capaian (%)	Rasio Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase unit kerja yang memperoleh layanan administrasi perkantoran.	100%	100	100	100
2	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana apartur.	80%	80	80	100
3	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.	60%	60	59	98,33
4	Persentase kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.	85%	85	79	92,94
5	Persentase masyarakat Kalimantan utara yang berwawasan kebangsaan	75%	75	74	98,66
6	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	73%	73	72	98,33

2.3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar **Rp. 11.604.563.826,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.079.871.826,- (Empat Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)** dan belanja langsung sebesar **Rp. 7.524.692.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** sedangkan realisasinya adalah **Rp 10.026.637.750,- (Sepuluh Milyar Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)** dengan rincian belanja tidak

langsung sebesar **Rp 3.231.234.600,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau sebesar **79,20 %**, dan belanja langsung sebesar **Rp 6.795.403.150,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)** atau sebesar **90,31 %** jika diuraikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2017

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I	Belanja Tidak Langsung	4.079.871.826	4.079.871.826	3.231.234.600	79,20
	Belanja Pegawai	4.079.871.826	4.079.871.826	3.231.234.600	79,20
II	Belanja Langsung	7.524.692.000	7.524.692.000	6.795.403.150	90,31
	- Belanja Pegawai	2.209.200.000	1.987.400.000	1.929.200.000	97,07
	- Belanja Barang dan Jasa	5.275.492.000	5.497.292.000	4.828.220.150	87,83
	- Belanja Modal	40.000.000	40.000.000	37.983.000	94,96
	Jumlah	11.604.563.826	11.604.563.826	10.026.637.750	86,40

2.4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2017 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Ikhtisar target kinerja untuk masing – masing sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja dan Indikator Sasaran 2017

Sasaran					
No	Uraian Kinerja	Indikator		Satuan	Target
	1	2		3	4
1.	Terwujudnya transparansi pelayanan publik dalam urusan kesatuan bangsa dan politik	1	Jumlah surat menyurat yang dikirim	Surat	600
		2	Jumlah bulan penyediaan jasa listrik, air, komunikasi dan internet	Bulan	12



		3	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	Bulan	12
		4	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor yang dibutuhkan	Bulan	12
		5	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	Unit	25
		6	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang dibutuhkan	Bulan	12
		7	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12
		8	Jumlah bulan penyediaan komponen, alat/intalasi kelistrikan	Unit	1
		9	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	5
		10	Jumlah penyediaan buku, majalah, koran	Exemplar	2.160
		11	Jumlah porsi makan/minum	Porsi	4.000
		12	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	60
		13	Jumlah rapat rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Kali	90
		1	Jumlah gedung/kantor yang disewa	Paket	1
		2	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dirawat	Unit	33
2.	Meningkatnya kesadaran terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	1	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/diklat	Orang	27
		2	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kegiatan	1
3.	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman dilingkungan masyarakat	1	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan	Kegiatan	5
		2	Jumlah kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan	Kegiatan	3
4.	Terwujudnya kewaspadaan dan hubungan yang bersinergi antar lembaga	1	Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat dalam pencegahan kejahatan	Kegiatan	2
		2	Jumlah laporan atas kegiatan ekososbud	Laporan	2
5.	Terwujudnya rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan	1.	Jumlah rapat pengurus dan anggota FKUB dengan tokoh agama dan masyarakat	Kegiatan	1
		2	Jumlah kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial	Kegiatan	3

6.	Tercapainya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial	1	Jumlah rapat forum pembauran kebangsaan (FPK)	Kali	1
		2	Jumlah seminar, talk show, diskusi Peningkatan wawasan kebangsaan	Kali	2
7.	Meningkatnya kesadaran berpolitik yang sehat dan demokratis di masyarakat	1	Jumlah penyuluhan tentang partai politik	Kali	2
		2	Jumlah fasilitasi perselisihan partai politik	Kali	1
		3	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Laporan	1

Indikator Kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari:

- a. Masukan (**Inputs**) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Output, misalnya sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (**Outputs**) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan ;
- c. Hasil (**Outcome**) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. **Outcomes** merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat ;
- d. Manfaat (**Benefit**) adalah kegunaan suatu keluaran (**outputs**) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik ;
- e. Dampak (**Impact**) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator – indikator tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Oleh karena itu untuk kegiatan tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara baru menerapkan indikator kinerja kegiatan berupa input, Output, dan

Outcome sedangkan Benefit dan Impact belum diterapkan dikarenakan belum adanya sistem pengumpulan data untuk indikator kinerja yang dapat diukur secara obyektif.

2.5. SARANA DAN PRASARANA

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut dan merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menyiapkan sarana dan prasarana terutama sarana dan prasarana fisik gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara masih menyewa (kontrak) sehingga belum memenuhi syarat, sedangkan untuk sarana penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah cukup memadai, namun sampai saat ini kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi di Kalimantan Utara masih sangat kurang, untuk itu merupakan perhatian yang sangat serius bagi pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahlian yang memang sangat dibutuhkan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, adapun data sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2.4
Daftar Sarana Dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2017

NO	NAMA BARANG	SATUAN/ UNIT	PEROLEHAN/TAHUN	
1	2	3	4	
1.	Toyota Inova	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
2.	Toyota Hilux Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
3.	Toyota Avanza Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
4.	Honda Blade	3	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
5.	Komputer PC Acer	8	Pengadaan	2013
6.	Laptop Sony Vaio	6	Pengadaan	2013
7.	Komputer all in one	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
8.	Laptop HP	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013



9.	Printer Canon MP 237	5	Pengadaan	2013
10.	Printer LQ 2190	1	Pengadaan	2013
11.	Meja pimpinan	1	Pengadaan	2013
12.	Kursi pimpinan	1	Pengadaan	2013
13.	Meja kerja	30	Pengadaan	2013
14.	Kursi kerja	30	Pengadaan	2013
15.	Sofa Tamu	1	Pengadaan	2013
16.	Meja sekuriti	2	Pengadaan	2013
17.	Lemari Arsip	5	Pengadaan	2013
18.	Toyota Hilux Type V	1	Pengadaan	2014
19.	Toyota Hilux Pick Up	3	Pengadaan	2014
20.	Toyota Rush	4	Pengadaan	2014
21.	Honda Supra X	8	Pengadaan	2014
22.	Honda CBR	4	Pengadaan	2014
23.	Laptop HP	8	Pengadaan	2014
24.	Printer Epson LX 310	3	Pengadaan	2014
25.	Printer Epson L350	6	Pengadaan	2014
26.	Printer Canon LBP 6000	2	Pengadaan	2014
27.	Hardisk 1 TB	4	Pengadaan	2014
28.	Flask disk	7	Pengadaan	2014
29.	Kamera Canon EOS 600D	5	Pengadaan	2014
30.	Handycam Sony	3	Pengadaan	2014
31.	Infokus	5	Pengadaan	2014
32.	Handy Talki	32	Pengadaan	2014
33.	Brangkas	1	Pengadaan	2014
34.	Pemotong Kertas	1	Pengadaan	2014
35.	Felling kabinet	5	Pengadaan	2014
36.	Mesin ketik manual	1	Pengadaan	2014
37.	Laptop	5	Pengadaan	2015
38.	Printer	2	Pengadaan	2015
39.	Printer	10	Pengadaan	2015
40.	Kipas Angin	5	Pengadaan	2015
41.	Exster Hard Disk 2 TB	6	Pengadaan	2015
42.	Flasdis 32 GB Usb 3.0	10	Pengadaan	2015
43.	Mesin Jilid	1	Pengadaan	2015
44.	Mesin Pres	1	Pengadaan	2015



45.	Router	1	Pengadaan	2015
46.	Switch	1	Pengadaan	2015
47.	Kabel Jaringan	1	Pengadaan	2015
48.	Scaner Outomatik	3	Pengadaan	2015
49.	Sepeda Motor Vario	6	Pengadaan	2015
50.	Mobil Toyota Fortuner	1	Pengadaan	2015
51.	AC Mobil dan Tape	3	Pengadaan	2015
52.	Komputer PC	5	Pengadaan	2015
53.	Mesin Foto Copy	1	Pengadaan	2015
54.	Penghisap Debu	1	Pengadaan	2015
55.	Penghitung Uang	1	Pengadaan	2015
56.	Mesin Ginset	1	Pengadaan	2015
57.	Mesin Absensi	1	Pengadaan	2015
58.	Filling Kabinet	5	Pengadaan	2015
59.	UPS	4	Pengadaan	2015
60.	Komputer PC HP	2	Pengadaan	2016
61.	Kursi Hadap	4	Pengadaan	2016
62.	Kursi Tamu	4	Pengadaan	2016
63.	Meja Kerja Eselon IV	5	Pengadaan	2016
64.	Kursi Kerja Eselon IV	7	Pengadaan	2016
65.	Amplifier	1	Pengadaan	2016
66.	Perlengkapan Mic	1	Pengadaan	2016
67.	Speaker	1	Pengadaan	2016
68.	Printer Portabel	1	Pengadaan	2016
69.	Mesin Ketik Standar	2	Pengadaan	2016
70.	Lemari Arsip	2	Pengadaan	2016
71.	DVR	1 Unit	Pengadaan	2017
72.	Camera Indoor	10 Unit	Pengadaan	2017
73.	Camera Outdoor	6 Unit	Pengadaan	2017
74.	Cablel CCTV	1 Unit	Pengadaan	2017
75.	Jek BNC	32 Unit	Pengadaan	2017
76.	PSU	1 Unit	Pengadaan	2017
77.	Instalasi dan Asesoris	1 Unit	Pengadaan	2017
78.	Dak Kable 45x40	2 Unit	Pengadaan	2017
79.	TV 32 Inchi	1 Unit	Pengadaan	2017

2.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dalam Tahun Anggaran 2017 dalam mengelola program dan kegiatan ada beberapa kegiatan yang belum 100% dilaksanakan dengan alasan ada beberapa hal yang mempengaruhi antara lain:

1. Kegiatan pengendalian kebisingan gangguan dari kegiatan masyarakat sudah dilaksanakan dengan capaian 84,72 %, hal tersebut dikarenakan belum dapat melibatkan seluruh instansi daerah maupun instansi vertikal yang terkait .
2. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan belum tercapai 100 % dengan capaian 86,75 % karena karena keterbatasan waktu dan personel.
3. Kegiatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dengan capaian 95,00 % hal tersebut dikarenakan ada beberapa pengadaan paket makan minum tidak seluruhnya terserap.
4. Kegiatan fasilitasi penyelesaian partai politik dengan capaian 96,43 % hal tersebut dikarenakan ada beberapa paket cetak dan penggandaan serta perjalanan dinas tidak seluruhnya terserap.

Kedepannya diharapkan semua kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dengan tepat waktu sehingga tidak ada lagi kegiatan yang harus diselesaikan di akhir tahun anggaran. Perencanaan harus dilakukan dengan matang dan terencana sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya.

BAB III

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

3.1. KOORDINASI UMUM PEMERINTAHAN

A. Forum Koordinasi

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

B. Materi Koordinasi

1. Menciptakan dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat.
3. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antar suku, agama, ras dan antar golongan.

C. Instansi Vertikal Yang Terlibat

1. Kementerian Agama Wilayah/Kabupaten/Kota.
2. Badan Intelijen Daerah (Binda) Prov. Kalimantan Utara.
3. Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman.
4. Komando Resort Militer 091/ASN
5. Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur.
6. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
7. Kejaksaan Negeri se Kalimantan Utara.
8. Kantor Imigrasi Tarakan dan Nunukan.
9. Kepolisian Resort se Kalimantan Utara.
10. Komando Distrik Militer se Kalimantan Utara.

D. Sumber dan Jumlah Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara tidak menganggarkan kegiatan yang berkaitan dengan forum-forum yang bekerja sama namun pemerintah provinsi memberikan bantuan/hibah keuangan sebagai berikut:

1. FKUB sebesar Rp.400.000.000
2. FKDM sebesar Rp.250.000.000
3. FPK sebesar Rp.200.000.000

E. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan

1. Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan tema Eksistensi FKUB Dalam Upaya Meningkatkan Perilaku Toleran Dan Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Utara 2017 pada tanggal 1 Agustus 2017 di Ruang Bandiklat Kab. Bulungan Tanjung Selor.
2. Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah dengan tema peningkatan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 21 April 2017 di Ruang Pertemuan Hotel Duta Tarakan.
3. Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Se-Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 25 Juli 2017 di Pertemuan Hotel Pangeran Khar Tanjung Selor.

F. Hasil dan Manfaat Koordinasi

1. Meningkatkan peran dan fungsi FKDM Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
2. Meningkatkan peran dan fungsi FPK Provinsi Kalimantan Utara dalam menciptakan persatuan dan kesatuan antar suku, agama, ras dan antar golongan.
3. Meningkatkan peran dan fungsi FKUB Provinsi Kalimantan Utara dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama.

G. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

1. Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah bisa menjadi bahan tindak lanjut bagi anggota FKDM untuk meningkatkan kewaspadaan dini di kabupaten/kota masing-masing.
2. Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Se-Provinsi Kalimantan Utara bisa menjadi bahan tindak lanjut bagi anggota FPK untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antar suku, agama, ras dan antar golongan.



3. Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bisa menjadi bahan tindak lanjut bagi anggota FKUB untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama.

H. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Forum-forum yang ada di Provinsi Kalimantan Utara perlu di berikan ruang, pembinaan dan pengawasan agar dapat tetap konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk membangun Provinsi Kalimantan Utara agar dapat terwujud rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya.



BAB IV

PENUTUP

Setiap pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sebagai bahan evaluasi organisasi perangkat daerah terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Dengan adanya laporan ini dapat menjadi tolak ukur dalam Laporan Penyelenggaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.

Segala hambatan dan tantangan pasti ada dalam setiap hal yang dilakukan tetapi tidak mengurangi semangat dalam bekerja demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Seluruh Aparatur Sipil Negara dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan kontribusi dan dukungan agar dapat mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran dari Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat terus maju dalam membangun Kalimantan Utara.

Dengan demikian semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara ini dapat berguna bagi berbagai pihak dan menjadi acuan untuk penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA
: URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	100 %	Berdasarkan Program Nasional RKP 2015
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 5 SOP 1. SOP tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bagi Ormas,LSM 2. SOP tentang Surat Rekomendasi Penelitian (SRP) 3. SOP tentang Pencairan Bantuan keuangan kepada Partai Politik 4. SOP tentang Penerbitan Surat Keterangan Lapor (SKL) 5. SOP tentang Verifikasi Bantuan Hibah kepada LSM/Ormas dan OKP	Ada 5	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100 %	- Perda pelaksanaan sebanyak 2 1. Perda No:1/2015 tentang APBD tahun 2016 2. Perda No:5/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 13 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14	92,55 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada :	-	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 24 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 3.074 personil	0,78 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan diklat pim dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org	84,61 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada 3 dokumen perencanaan 1. RENSTRA- SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD	Ada 3	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program.	25 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100 %	- Total APBD SKPD, sebesar Rp. 11.604.563.826,- - Total Belanja APBD PROV, sebesar Rp. 3.063.202.248.558,37	0,38 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 40.000.000,- - Total APBD SKPD, sebesar Rp. 11.604.563.826,-	0,34 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 223.000.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 5.497.292.000,-	4,05 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 223.000.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11. 604.563.826,-	1,92 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Ada 3 dokumen pelaporan keuangan 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Ada 3	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada 3 Jenis dokumennya 1. Kartu Inventaris Barang (KIB) B 2. Kartu Rekapitulasi Barang (KIB) B 3. Buku Inventaris	Ada 3	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 4.864.321.200,-	Tidak Ada 100 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Website 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media 6. Baliho	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas dan Prasarana ada 4 : 1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Pos Pengaduan 4. Baliho	Ada 4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Hasil survey kepuasan publik masyarakat terhadap pelayanan public urusan kesbangpol	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

Tanjung Selor, 11 Januari 2018
Kepala,

Drs.BASIRAN
NIP. 19691228 199101 1 001

Lampiran 1.3
LAMPIRAN LPPD TAHUN 2017
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

URUSAN KESBANGPOL

NO	DATA	CAPAIAN KINERJA	URAIAN KEGIATAN	JADWAL	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	8 Kegiatan	Sosialisasi Undang-undang pilkada dan penguatan kapasitas politik bagi perempuan	23 Maret 2017	±100 Peserta	1 Tarakan
			Lomba Pendidikan Politik antar SMA/SMK Tahun 2017	10 April 2017	±150 Peserta	2 Nunukan
			Sosialisasi bantuan keuangan partai politik se Provinsi Kalimantan Utara	5 Juni 2017	±60 Peserta	3 Tanjung Selor
			Sosialisasi Perpu Nomor: 02 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas	14 dan 27 September 2017	±100 Peserta	4 Tarakan dan Nunukan
			Sosialisasi Perpu Nomor: 02 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor: 57 Tahun 2017	2 dan 15 Nopember 2017	±100 Peserta	5 Bulungan dan Malinau
			Rapat Uji Petik Pengukuran Kinerja Ormas oleh Direktorat Ormas Ditjen Polpum	7 Desember 2017	±40 Peserta	6 Tarakan
			2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	11 Kegiatan	Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Kewaspadaan Terhadap masuknya Orang Asing di Wilayah Kalimantan Utara	30 Nopember 2017	±80 Peserta				2 Nunukan
Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	2 April 2017 dan 29 Nopember 2017	±80 Peserta				3 Malinau dan Nunukan
Rapat Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial se-Kalimantan Utara Tahun 2017 periode target B.04	10 Mei 2017	±40 Peserta				4 Tanjung Selor
Evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial se-Kalimantan Utara Tahun 2017 periode target B.04	16 Nopember 2017	±40 Peserta				5 Tarakan

			Lomba Cerdas Cermat Pancasila dan UUD 1945 Tahun 2017	9 -10 Mei 2017	±16 Kelompok	6	Tanjung Selor
			Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan	23 Mei 2017	±175 Peserta	7	Tanjung Selor
			Rakor FKP se KalimantanUtara	25 Juli 2017	±80 Peserta	8	Tanjung Selor
			Rakor FKUB se	1 Agustus 2017	±80 Peserta	9	Tanjung Selor
			Kegiatan Seminar Kesetaraan Gender	11 Desember 2017	±150 Peserta	10	Tanjung Selor

Tanjung Selor, 23 Mei 2018
a.n. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kaltara
Sekretaris

TAPIP PURNOMO, S.H.
NIP. 19641106 199203 1 010

LPPD | TAHUN 2016



Kesbangpol Badan
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jl. Kruing, Tanjung Selor 77212
Telp. (0552) 2026608, Fax. (0552) 2026052**